

# Budaya Lokal dalam Media Penyiaran Publik

---

**Nunung Sanusi**

## **Nunung Sanusi**

Prodi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi  
Universitas Sangga Buana YPKP

## **Abstrak**

Peran media sebagai sarana edukasi mengalami deviasi karena tergerus dengan kepentingan ekonomis media. Terlebih pada penayangan program siaran bernuansa budaya lokal. Stasiun televisi nasional enggan menayangkan acara bermuatan budaya lokal karena peminatnya sekelompok orang saja. Di stasiun televisi lokal pun prosentase durasi tayang acara budaya lokal kurang dari 50%. Dibutuhkan kebijakan khusus bagi media penyiaran publik untuk mewajibkan budaya lokal tayang lebih lama. Di sini peran regulator yaitu pemerintah mengintervensi tayangan yang jauh dari budaya khas bangsa dan mewajibkan media penyiaran publik untuk menayangkan program acara budaya lokal. Serta KPI sebagai wasit berperan lebih aktif dalam menjaga acara siaran lebih bernuansa budaya lokal. Budaya lokal bukan sekedar kesenian tetapi banyak nilai kehidupan yang tertanam dalam budaya lokal yang bisa diejawantahkan dalam kehidupan keseharian yang mesti terus diaarkan. Media penyiaran publik adalah sarana tepat dalam mewartakan budaya lokal kepada masyarakat kini.

Kata kunci: media penyiaran publik, budaya lokal,

## **Pendahuluan**

Di era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang tak hanya bermodalkan bambu runcing. Kronik sejarah mencatat bahwa, para pejuang juga berjuang melalui media massa. Media massa di masa pergerakan tak kalah berperan memperjuangkan Indonesia. Media cetak dan radio jadi ranah politik penting guna mencapai Indonesia merdeka.

Sebelum Indonesia merdeka, pers pergerakan memiliki karakter pers perjuangan. Para pengelola media lebih menonjolkan identitas media pembawa pesan kemerdekaan, bahkan sebagai kompor yang menggelorakan nasionalisme. Bukan media hiburan yang dibuat, malah media propaganda, medium pendidikan politik, jalan membangun kesadaran publik betapa pentingnya Indonesia merdeka. Media diarahkan secara serentak ke arah kemerdekaan Indonesia.

Pers di era pergerakan dikerahkan sepenuhnya untuk berjuang, keberadaan media massa dapat diartikan politis. Pers adalah alat perjuangan politik, bukan dalam pengertian politik-pragmatis-transaksional melainkan pers yang memosisikan diri sebagai pejuang kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia.

Kronik sejarah Indonesia membuktikan bahwa pers memiliki andil dalam merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejarah tidak dapat mengabaikan peran pers untuk Indonesia. Pers berjuang untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia: daulat rakyat dan nasionalisme.

Ingatan atas jasa para pejuang media lampau, janganlah sampai terlupakan. Spirit mereka perlu diaktualisasikan ke dalam kehidupan sekarang. Zaman memang berubah tapi spirit pergerakan tetap perlu terpelihara, demi Indonesia. Spirit pers jangan sampai ditelan kepentingan pragmatis, materialisme dan orientasi bisnis-politik media saja. Eksistensi pers yang mengutamakan publik, masyarakat, bangsa-negara mesti diutamakan.

Pers pergerakan yang diidamkan yakni pers yang menyusun agenda dengan mengikutsertakan publik. Meminjam

petuah Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang termuat dalam *The Elements of Journalism* (2006), pers yang loyal terhadap masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik.

## **Pengemasan Budaya Lokal Dalam Tayangan Media Massa**

Citra buruk tayangan media massa, khususnya televisi, saat ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan ideologi media. Ideologi media kini lebih condong pada kepentingan pasar. Artinya, televisi hanya akan menayangkan apa yang disukai pasar. Akibatnya, tayangan yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat tidak tayang karena tidak ada yang menonton. Implikasi logis bagi televisi bila acara yang ditayangkan tidak ada yang merespon adalah perginya pemasang iklan. Iklan adalah pemasok utama bagi keberlangsungan nyawa televisi. Semakin banyak iklan, semakin hidup televisi. Semakin sedikit iklan, maka televisi kembali memutar otak untuk membuat acara ditonton banyak kalangan dan mendatangkan iklan.

Lingkaran setan tayangan televisi antara program acara berorientasi pasar berhubungan langsung dengan banyak dan sedikitnya iklan ini tidak bisa dihentikan hingga sekarang. Televisi tidak lagi melihat masa depan anak-anak setelah menonton tayangan televisi tetapi kepentingan utama mereka adalah menumpuk kapital sebanyak-banyaknya. Justru anak-anak remaja adalah pangsa pasar yang empuk dalam tayangan televisi. Anak-anak remaja dibuat betah di depan televisi menyimak acara yang ditayangkan sesuai dengan keinginannya.

Implikasi lain dari ideologi pasar dalam tayangan televisi adalah keengganan televisi dalam menayangkan program acara yang bernuansa budaya lokal. Budaya lokal masih dianggap sebagai budaya kampung, kuno dan masa lalu. Budaya yang sekedar sejarah dan bila dimunculkan pun sebagai syarat keadaan saja. Di sisi lain, televisi, dan media massa lainnya, memiliki misi melahirkan budaya baru. Budaya yang

disenangi massa dan tidak peduli dengan nilai pada budaya itu sendiri. Nilai identitas kebangsaan, kultural bahkan religiusitas tidak menjadi tolok ukur. Bagi mereka, budaya baru mestilah menyokong mereka dalam menumpuk pundi-pundi kapital.

Bisa dilihat sekarang, nyaris tiada acara yang bernilai pada budaya lokal. Kalaupun ada durasinya beberapa waktu saja. Padahal budaya lokal memiliki misi edukasi dan penanaman nilai moral bagi anak-anak dan remaja. Budaya lokal lebih genuine dalam mengembangkan jatidiri anak remaja. Begitu banyak budaya lokal dalam keseharian kita, tulisan ini akan memfokuskan pada hilangnya bahasa ibu sebagai salah satu budaya lokal dalam tayangan televisi.

Untuk televisi lokal memang budaya lokal masih “laik jual”. Justru televisi lokal akan kehilangan penontonnya bila meninggalkan acara budaya lokal setempat. Berbeda dengan tayangan televisi nasional yang sudah tidak peduli dengan tayangan budaya lokal. Luas jangkauan serta bertitel sebagai stasiun televisi nasional menyebabkan mereka enggan menayangkan acara atau program televisi yang mengedepankan budaya lokal.

Padahal, sesuai dengan UU penyiaran, televisi nasional adalah televisi berjejaring dengan televisi lokal. Tetapi hingga kini penerapan UU ini tidak berjalan karena banyak hal, diantaranya televisi nasional akan kehilangan “share” iklan karena terbagi-bagi dengan televisi lokal. Ini akan sangat menurunkan pendapatan bagi televisi nasional. Terlebih bila televisi nasional tidak bisa menggaet jejaring televisi lokal. Sekarang ini pun sudah banyak televisi nasional yang melakukan jejaring siaran dengan televisi lokal, namun masih bersifat kerjasama dan durasi tayang program lokal di televisi nasional pun masih sedikit.

Ada tiga unsur utama dalam penayangan budaya lokal di televisi nasional. *Pertama*, dikotomi budaya lokal dan modern meminggirkan budaya lokal dalam kancah budaya itu sendiri. Budaya lokal dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Budaya modern merupakan budaya

kekinian dan terus melahirkan budaya-budaya baru yang sesuai dengan zamannya. Sehingga menimbulkan penilaian tiadanya budaya inti, yang ada adalah budaya spasial. Budaya artifisial yang kehilangan inti budayanya sendiri.

Terlebih di era postmodernisme seperti sekarang ini antara public dan privat sudah semakin cair dan semua orang bisa memiliki banyak wajah. Sehingga semua orang tidak memiliki identitas jelas. Identitasnya segera berubah ketika ia berada di posisi yang lain. Postmodernisme menempatkan modernism sebagai tanda baca koma, belum selesai. Modernism telah menghilangkan manusia sebagai entitas kemanusiaannya sendiri. Modernism menempatkan manusia sebagai alat tak ada bedanya dengan alat produksi.

Di sisi lain, budaya lokal menempatkan tradisi sebagai sesuatu yang pakem dan ajeg. Ia tidak bisa diubah sesuai kehendak zaman. Justru zaman yang mesti menyesuaikan dengan tradisi. Keajegannya ini semakin terjaga dengan adanya hukuman bagi pemangku adat yang tidak menerapkan nilai-nilai tradisi. Adat tradisi tetap terjaga dengan adanya komunitas yang ditetapkan masyarakat sebagai penjaga tradisi.

Kesan kuno dan ketinggalan zaman karena budaya lokal lambat, kalau tidak dibalang menolak, perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat seiring permintaan manusia. Teknologi lahir dari permintaan manusia yang ingin memanjangkan tangan, menjauhkan pandangan hingga meluaskan pendengaran.

Kesan lainnya, budaya lokal adalah budaya masa lalu. Budaya yang mesti sudah diganti, ditinggalkan dan dilupakan. Budaya lokal tidak menarik bagi pemirsa televisi yang mayoritas anak-anak remaja. Masa remaja adalah masa penjelajahan. Masa di mana adrenalin rasa ingin tahu sangat tinggi. Rasa ingin tahu dan mengalami budaya yang sedang “in” menjadikan remaja enggan menggunakan budaya lokal.

*Kedua*, kemajemukan bangsa ini menjadikan setiap suku memiliki kekhasan

sendiri-sendiri. Sementara Nusantara memiliki ratusan etnik yang memiliki kekhasan masing-masing. Tentunya akan sangat berat bagi televisi nasional menayangkan acara-acara bernuansa budaya lokal. Terlebih hanya beberapa suku saja yang memiliki jumlah penduduk banyak. Itu pun mesti berebut dengan televisi lain yang menayangkan acara senada.

Lagi-lagi televisi lokal merupakan jawaban bagi penayangan budaya lokal dengan durasi yang lebih panjang. Televisi lokal dibenarkan untuk lahir dengan maksud agar budaya lokal hidup kembali dengan tayangan-tayangan di televisi. Bagaimanapun, televisi memiliki efek yang lebih luas dan massif dibanding media massa lainnya. Selain *sharing* iklan yang lebih berkeadilan, ragam acara pun lebih mengena kepada khalayak.

*Ketiga*, peraturan pemerintah tentang penyiaran sejak era Presiden Megawati mewajibkan televisi melakukan jejaring penyiaran. Televisi nasional masih menjadi primadona terutama dari pengusaha media, terutama yang berada di Ibukota. Mereka memanfaatkan media sebagai ladang bisnis dengan keuntungan yang menggiurkan.

Dengan adanya televisi lokal, akan banyak tenaga profesional penyiaran televisi terserap sebagai tenaga kerja. Pun, distribusi informasi akan lebih merata. Sebab, selama ini televisi nasional hanya menayangkan informasi di ibukota saja, sementara informasi dari daerah tidak terserap banyak. Terutama disiarkan budaya lokal oleh televisi lokal, menjadikan budaya lokal diterima di negerinya sendiri. Oleh karenanya, televisi lokal sangat dibutuhkan bagi pengembangan budaya lokal.

### **Bahasa Ibu Dalam Tayangan Televisi**

Era tahun 1990, TVRI Stasiun Bandung menayangkan serial sinema elektronik dengan judul *Inohong* di Bojongsrangkong. Sinetron ini menggunakan bahasa Sunda sebagai dialog. Sinetron ini diterima oleh banyak kalangan di Kota Bandung khususnya karena beberapa hal, *pertama*, tema keseharian

yang dekat dengan keseharian masyarakat Sunda seakan menjadi cermin kehidupan penonton. Tema-tema keseharian ini lebih bisa diterima penonton karena mudah dicerna. Baik actor protagonist maupun antagonis membumi seperti keseharian masyarakat Sunda.

*Kedua*, penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa dialog. Karakter lakon sinetron ditambah dengan penggunaan bahasa Sunda sebagai pengantar membuat sinetron ini semakin pas. Terlebih bahasa Sunda yang digunakan merupakan bahasa Sunda yang umum dipakai. Lebih utama lagi spirit yang dibangun dari sinetron ini menunjukkan bahwa sinetron ini memang jelas ditujukan untuk siapa.

*Ketiga*, budaya Sunda dalam sinetron ini bukan sedar bahasa saja tetapi pada perilaku yang *nyunda* pula. Perilaku dalam hubungan anak dengan orangtua, perilaku terhadap tetangga, perilaku terhadap sesama menunjukkan bagaimana seharusnya tata pergaulan dalam kehidupan sehari-hari ala orang Sunda. Secara tidak langsung sinetron ini mengajarkan kepada generasi muda Sunda tentang budayanya. Budaya yang akan terus ditransferkan kepada generasi berikutnya.

Setiap tahun satu bahasa ibu di dunia hilang. Pengaruh globalisasi menjadikan imperialisme budaya melalui pengaruh bahasa sangat terasa. Terlebih dengan semakin berkurangnya penutur dalam keseharian. Penutur bahasa ibu ini semakin berkurang karena banyaknya penutur muda yang enggan menggunakan bahasa ibu dalam kesehariannya. Padahal kelestarian bahasa ibu hanya bisa terjadi bila penutur semakin banyak.

Televisi yang menayangkan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar sangat sedikit. Bahkan pada stasiun televisi nasional nyaris tidak ada. Padahal bahasa ibu setiap tahun diperingati. Di Indonesia ada ratusan bahasa ibu. Sejatinya ia bisa menjadi tayangan yang diminati dengan pengemasan yang menarik. Bahasa ibu di Jawa tengah dan Jawa timur dikemas dalam berbagai drama, bahkan pembacaan berita menggunakan bahasa ibu.

Banyak upaya dalam pelestarian bahasa ibu sebagai salah satu khazanah budaya lokal yang menggunakan media penyiaran publik sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Peran pemerintah diperlukan untuk mengatur regulasi penayangan budaya lokal dalam media penyiaran publik. Tanpa regulasi yang ketat, bahasa ibu akan hilang dari bumi pertiwi.

### Penutup

Siaran televisi mendatangi kita secara serentak dan meluas, tanpa perlu kita undang (*pervasive presence theory*). Tayangan anak yang tidak patut ditonton dapat begitu saja hadir di depan anak. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa, industri penyiaran perlu diatur dengan ketat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan ketat dan tegas memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Dalam analisis pakar komunikasi Atie Rachmiatie terhadap televisi lokal di Jawa Barat (2007) disebutkan bahwa, kekurangan televisi lokal yakni pada kualitas teknik yang belum optimal, materi siaran yang kurang variatif memunculkan potensi seni daerah, dan harapan agar siaran informasi lebih aktual, faktual dan transparan. Hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan media lokal di Jawa Barat, yakni ada kepemilikan media oleh pemodal kuat nasional yang berekspansi ke daerah, dan kedua pengusaha lokal yang terjun ke bisnis media dengan teknis, modal, sumber daya manusia, dan profesionalisme yang belum optimal.

Oleh karenanya, dalam penyajian materi siaran, pelaku penyiaran perlu memperhatikan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Sunda. Di sisi lain, dengan mengangkat nilai-nilai lokal Jawa Barat diharapkan dapat menjaga sekaligus memperkuat budaya lokal di Jawa Barat.

Lembaga penyiaran perlu didorong untuk menjunjung kearifan lokal. Tidak hanya sebagai pelestari dan penyebar budaya lokal, melainkan juga merangkap sebagai pengembang. Konservasi budaya

melalui konten siaran sangat perlu untuk Jawa Barat. Dari langkah ini kemudian, kekayaan budaya Jawa Barat dapat menjadi modal sosial pembangunan.

Sejumlah televisi dan radio di Jawa Barat sudah serius menggarap kearifan lokal ini. Upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut perlu dipertajam lagi agar dapat memperkuat budaya dan membuka pemerataan kesempatan dan kesejahteraan di kalangan pelaku budaya. Siaran yang menarik penonton, tentu menarik iklan, dan disenangi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi program perlu dikerjakan bersama antara KPID Jawa Barat dan lembaga siaran. Konten siaran mesti menunjukkan keberagaman budaya di Jawa Barat. Keberagaman adat dan perbedaan budaya mesti dipandang sebagai modal sosial. Bukan dipandang sebagai sumber perpecahan.

### Daftar Pustaka

- Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Amir Effendi Siregar, *Regulasi Penyiaran, Infotainment dan Jurnalisme: Silet, Antara Fiksi dan Non Fiksi dalam Kasus Silet: Kemenangan bagi Publik*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Tim Bidang Isi Siaran, 2012.
- Ashadi Siregar, *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2006.
- Atie Rahcmiatie, *TV Lokal dan Kemerdekaan Arus Informasi* dalam *Jurnal ISKI Bandung*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2007.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau, 2001.

Ery Sutrisno (ed.), *Reformasi Media Massa*, Jakarta: AJI, 1999.

Philip Kitley, *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*. Jakarta: Lembaga Studi Pers Pembangunan, Institut Studi Arus Informasi, dan PT Lintas Media, 2000.

Santi Indra Astuti, Media Literacy: Memerdekakan Khalayak dari Kapitalisme dalam Jurnal ISKI Bandung, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2007.

Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1996.

### **Media Siber**

TribunNews.com, 23 November 2013.  
Dikutip 20 September 2014.

SuaraPembaruan.com, 1 Juni 2014. Dikutip  
20 September 2014.

KabarKampus.com, 31 Desember 2013.  
Dikutip 20 September 2014.